

**ANALISIS
PENINGKATAN EKONOMI INDONESIA TANPA MENAMBAH
BEBAN UTANG LUAR NEGERI**



Oleh : Dr. Yolanda, SE. MM

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA
2010**

**HALAMAN PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN**

1. Judul : Analisis Peningkatan Ekonomi Indonesia
Tanpa Menambah Utang Luar Negeri
- Bidang Ilmu : Ekonomi
2. Pelaksana
- a. Nama : Dr. Yolanda, SE. MM
 - b. NIP/NIDN : 19620121198903 2001/0021016202
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - d. Fakultas : Ekonomi
 - e. Program Suti : Manajemen
3. Alamat Pelaksana
- a. Alamat Rumah : Pangkalan Jati III No. 35 Cipinang
Melayu Jakarta Timur.
 - b. Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Univ. Borobudur
Jalan Raya Kalimalang No. 1 Jakarta
Timur
4. Lokasi Penelitian : Indonesia
5. Biaya : -
6. Sumber Biaya : Mandiri



(Prof. Dr. Wahyu Murti, SE, MM)

Jakarta, 5 Oktober 2010
Pelaksana,

(Dr. Yolanda, SE. MM)



(Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM)



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

JALAN RAYA KALIMALANG No. 1 JAKARTA TELP. 8618292 - 8618293 - 8613877 - 8618291 - 8613868 - 8613869 - 8613870 - 8613871 - 8613872

SURAT KETERANGAN

Nomor: 78 / Perpust-YPB /X /2010

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tanyo Setyowati, SE, MM
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Borobudur.

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Dr. Yolanda, SE,MM
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur

Telah menyerahkan 1 (satu) buah berkas Karya Ilmiah kepada Perpustakaan Universitas Borobudur yang berjudul :

“Peningkatan Ekonomi Indonesia Tanpa menambah Beban Utang Luar Negeri di Jakarta”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Oktober 2010

Kepala Perpustakaan
Universitas Borobudur

Tanyo Setyowati, SE,MM

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmatnya terutama nikmat iman, kesehatan, dan tak lupa sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW . sehingga tulisan ini diberi kemudahan dalam penyelesaiannya.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisannya tulisan ini yang berjudul :

ANALISIS PENINGKATAN EKONOMI INDONESIA TANPA MENAMBAH BEBAN UTANG LUAR NEGERI

Penulis menyadari sepenuhnya tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, segala saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan sehingga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 22 September 2010
Penulis

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan

II. Masalah Ekonomi

III. Kajian Teori

- A. Produk Domestik Bruto
- B. Kebijakan Fiskal
- C. Kebijakan Moneter
- D. Kebijakan Perdagangan

IV. Pembahasan

- A. Gambaran Perekonomian Indonesia
- B. Perkembangan Utang Indonesia
- C. Upaya Peningkatan
 - 1. Kebijakan Fiskal
 - 2. Kebijakan Moneter dan Perbankan
 - 3. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
 - 4. Kebijakan-Kebijakan Non Ekonomi

V. Kesimpulan Dan Saran

Daftar Pustaka.

**PEMULIHAN EKONOMI
DAN PENINGKATANNYA TANPA MENAMBAH
BEBAN UTANG LUAR NEGERI**

Oleh : Dr. Yolanda, MM

I. PENDAHULUAN.

Badai krisis moneter tahun 1997 dalam bentuk terdepresiasinya rupiah merupakan imbas dari gejolak bath Thailand dan ditambah oleh ulah para spekulan yang ingin mencari keuntungan dari perbedaan nilai tukar rupiah dengan US \$. Sasaran utama dari para spekulan tersebut adalah negara-negara yang memiliki struktur perekonomian yang rapuh, perbedaan suku bunga (interest rate differential) yang tinggi antara suku bunga domestik dengan internasional dan kurs mata uangnya dinilai overvalued.

Kondisi perekonomian Indonesia yang relatif kokoh juga tidak luput dari para spekulan, karena masih adanya kelemahan yang memberikan peluang pada para spekulan melaksanakan aksinya. Kelemahan yang dimiliki tersebut adalah :

- (1) Posisi defisit transaksi berjalan terus meningkat 4 % dari GDP tahun 1997
(Econit).
- (2) Posisi cadang devisa mencapai US \$ 19,8 miliar, dengan stand by loan sebesar US \$ 2 Milyar (Menpen RI, November 1997).
- (3) Utang luar negeri kumulatif terus meningkat dan kurang terkendali. Total utang LN mencapai US \$ 52,3 Milyar merupakan utang pemerintah sekitar 45 % dari total utang pemerintah dan swasta (Menkeu RI 1997) dan utang swasta sebagian besar tidak di hedge (diberi perlindungan / proteksi atas kemungkinan terjadinya selisih kurs). Utang luar negeri yang terus membengkak, terhitung bulan Februari 1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat diantaranya utang

swasta nasional USD73,962 miliar dan utang pemerintah USD63,462 miliar, jadi utang seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS.

(4) Angsuran pokok dan bunga yang cenderung meningkat tidak diimbangi oleh kenaikan total ekspor yang memadai, sehingga meningkatkan debt service ratio dan pada akhir tahun 1997/1998 debt service ratio diperkirakan mencapai 34,5 persen (Menkeu RI, 20 November 1997).

(5) Kondisi sektor moneter dan perbankan yang belum seluruhnya dalam kondisi sehat dan membesarnya kredit bermasalah.

Kondisi nilai rupiah yang terus melemah tersebut dan ditambah dengan dorongan kepanikan masyarakat yang secara teknis dan analitik terbatas pengetahuannya dibidang moneter/ keuangan, menyebabkan pemerintah mengambil langkah dari memangedrupiah terhadap mata uang asing floating exchange rate menjadi free floating exchange rate.

Kronologis gejala rupiah dan langkah-langkah pemerintah untuk menahannya untuk tahun 1997 diawal krisis adalah sebagai berikut :

Tanggal/tahun	Keterangan
21 Juli 1997	Rupiah terkena imbas bath Thailand. Nilai kurs melemah menjadi Rp. 2.650 per dollar AS.
21-24 Juli 1997	Kurs terus bergejolak. BI intervensi ke pasar Forward. Kurs sedikit stabil, menguat hingga Rp. 2.545/dolar AS
29 Juli 1997	Pengetatan likuiditas, suku bunga SBI naik 6 % menjadi 14 %. SBPU untuk sementara dihapus.
14 Agustus 1997	Intervensi BI US \$ 1 milyar ke pasar forward kurang bisa menolong keadaan. BI melepas Band intervensi dan mengembangkan rupiah untuk menyelamatkan cadangan devisa.
15-18 Agustus 1997	Masyarakat panik dan terus menjual rupiah, karena belum paham dengan kebijakan krus mengambang yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah moneter Indonesia.
19 Agustus 1997	Pengetatan likuiditas. BI menaikkan suku bunga SBI jangka

	waktu 1 dan 3 bulan masing-masing menjadi 30% dan 28 %. Rupiah menguat menjadi Rp. 2870 (data BI) dan Rp. 2.880 (antar bank) per dollar AS.
25 Agustus 1997	Rupiah melemah lagi, sebagai dampak penyedotan rupiah termasuk penarikan dana BUMN rp. 2 triliyun dan penyedotan pembayaran tagihan ke kantor Pembedaharaan Negara sehingga rupiah langka.
26 Agustus 1997	Bunga transaksi pinjaman overnite antar bank meningkat tajam, hingga mencapai 100 %
29 Agustus 1997	BI mengijeksi dana US \$ 500 juta kepada bank-bank yang kesulitan likuiditas. Rupiah masih melemah, karena dipicu isu penurunan bunga SBI. Rupiah menembus Rp. 3000/dollar AS, terdepresiasi lebih dari 27 % sejak Januari 1997. BI mengeluarkan kebijakan baru yaitu membetasi transaksi forward valas terhadap rupiah dari bank-bank di dalam negeri kepada nasabah asing, lembaga non perbankan dan bank maksimal US \$ 5 juta perbank.
1 September 1997	Kebijakan baru BI di atas berpengaruh pada vals antar bank. Pemerintah mengisyaratkan akan melonggarkan likuiditas.
2 September 1997	Kurs melemah mencapai Rp. 3,060/dollar AS akibat pernyataan likuiditas dilonggarkan dan melemahnya mata uang malaysia dan singapura.
3 September 1997	Menkeu mengumumkan 10 langkah konret pemuliahan kondisi ekonomi.
8 Oktober 1997	Pemerintah memutuskan minta bantua IMF.
31 Oktober 1997	Pengumuman resmi pemerintah tentang bantuan IMF US \$ 23 milyar.
31 Oktober 1997	Pemerintah mengeluarkan PP no.40/1997 sebagai revisi PP no. 68/1996 tentang likuidasi bank.
1 November 1997	Otoritas moneter mencabut izin usaha 16 bank umum (sk Menkeu No. Peng -86/1997).

Melemahnya nilai kurs tersebut mengakibatkan :

1. Krisis pada sektor APBN.

Adalah pada sisi penerimaan negara dan pengeluaran negara. Dari sisi penerimaan negara, krisis ekonomi melemahkan daya beli masyarakat, mengurangi pendapatan masyarakat akan mengurangi pendapatan negara khususnya pada sektor perpajakan. Dari penerimaan sektor non pajak juga terjadi penurunan seiring dengan menurunnya bagian laba dari BUMN. Sedangkan dari sisi

pengeluaran, sesuai dengan fungsi APBN yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi, maka krisis ekonomi mengakibatkan beratnya beban pengeluaran negara untuk menjalankan ke 3 fungsi diatas.

2. Krisis pada sektor moneter dan perbankan.
3. Krisis pada sektor perdagangan luar negeri.

Penyebab krisis dari sektor perdagangan luar negeri adalah defisit neraca berjalan yang langsung terus menerus. Namun krisis ekonomi membawa dampak kepada berkurangnya daya saing perdagangan luar negeri sehingga kemampuan ekspor yang meningkat karena defresiasi rupiah, belum mampu menutupi laju impor dan defisit jasa-jasa.

4. Krisis dari sudut non ekonomi

Adalah krisis dalam bidang budaya, pertahanan keamanan, hukum, sosial politik, dan pemerintahan.

Berikut Gambaran utang yang di masa-masa Pemerintahan :

- a. **Utang di Era Soekarno (1945–1966)**

Pemerintahan Soekarno meninggalkan utang luar negeri sebesar USD 6,3 miliar yang terdiri dari utang warisan Hindia Belanda sebanyak USD 4 miliar dan utang pemerintah USD 2,3 miliar dengan rentang 30 tahun sejak 1970 dan jatuh tempo 1999.

- b. **Era Soeharto (1966–1998)**

Masa pemerintahannya presiden Soeharto meninggalkan utang luar sebesar : utang sebesar USD136.088 (1997) yang terdiri dari ULN Pemerintah sebesar USD 53.865 dan ULN Swasta USD82.223.

c. **Era Habibie (1998–1999)**

Pemerintahan Habibie di tengah kondisi krisis moneter yang meninggalkan ULN (1999) sebesar USD 148.097 terdiri dari ULN pemerintah USD75.862 dan ULN Swasta USD72.235. Utang Pemerintah tersebut naik sebesar USD 21.997 dibanding tahun 1997 sebesar USD 53.865.

d. **Era Abdurrahman Wahid (1999–2001)**

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sejak 21 Oktober 1999. Pada masanya utang luar negeri turun menjadi USD141.693 terdiri dari utang pemerintah sebesar USD74.916 dan utang swasta USD 66.777.

e. **Era Megawati (2001–2004)**

Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, mencatat utang hingga Februari 2010 sebesar USD141.273 terdiri dari utang pemerintah USD83.296 dan swasta USD 57.977. Sedikit turun dari posisi total utang LN tahun 2000 yakni sebesar USD141.693.

f. **Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2009)**

Berdasarkan statistik utang yang dibuat pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Februari 2010 posisi utang luar negeri sampai Oktober 2009 meningkat menjadi USD 170,785 terdiri dari utang pemerintah USD98,859 juta dan swasta USD71.926.

Saat pemerintahan Presiden Soeharto, rasio utang mencapai 57,7 persen terhadap PDB, pemerintahan BJ Habibie (1998-1999) yang memerintah saat krisis moneter terjadi, rasio utang membengkak jadi 85,4 persen dari PDB. Zaman pemerintahan Gus

Dur (1999-2001), nilai utang pemerintah membumbung tinggi di periode 2000, rasio utang makin parah menjadi 88,7 persen. Sementara kepemimpinan Megawati Soekarnoputri (2001-2004), rasio utang terhadap PDB, meliputi: Tahun 2002: rasio utang 67,2 persen, Tahun 2003 rasio utang 61,1 persen dan tahun 2004 rasio utang 56,5 persen.

Sedangkan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), , rasio utang dan nilai utang Indonesia mencapai: tahun 2005 rasio utang 47,3 persen, tahun 2006: rasio utang 39 persen, tahun 2007 rasio utang 35,2 persen, tahun 2008 rasio utang 33 persen dan tahun 2009 rasio utang 28,3 persen.

Pada zaman Soeharto yang disebut zaman orde baru, pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 7%. Sedangkan zaman reformasi pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 14%, dimana keadaan ekonomi yang sulit (terjadinya krisis moneter) . Padahal saat Indonesia diterpa krisis ekonomi dan harga BBM yang melambung tinggi, dengan segala upayanya pemerintahan SBY di tahun 2008 pertumbuhan ekonomimencapai 6,4% dan pernah mencapai 7%. Setelah itu pertumbuhan ekonomi sekitar 6% saja.

II. Tinjauan Pustaka.

A. Produk Domestik Bruto.

Produk domestik bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) diyakini sebagai indikator terbaik dalam menilai berbagai keragaman ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu produk domestik bruto adalah indikator ekonomi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan ekonomi nasional secara luas. Dan produk domestik bruto juga memberikan informasi mengenai jumlah aggregate barang dan jasa yang telah diproduksi oleh ekonomi nasional untuk suatu parameter tertentu.

Menurut Mulia Nasution (1997.h. 63) produk domestik bruto adalah angka yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai uang hasil pertanian, industri sektor jasa dan berbagai aktivitas lainnya dalam masyarakat dengan memanfaatkan tanah, tenaga kerja modal dan ilmu pengetahuan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai uang seluruh pengeluaran untuk barang konsumsi, industri dan kebutuhan pemerintah.

Dengan demikian, maka produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja dinegara yang bersangkutan.

Produk domestik bruto (PDB) dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu :

1). Pendekatan produksi (*Production approach*)

Pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor produksi menurut *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC)* sektor industri dapat dikelompokkan menjadi 11 sektor yaitu

- (a) Pertanian/ *agriculture*
- (b) Pertambangan dan penggalan /*mining and quarrying*
- (c) Industri pengolahan/ *manufacturing industries*
- (d) Listrik, gas dan air bersih
- (e) Bangunan/ *Contruction*
- (f) Perdagangan, Restoran dan hotel
- (g) Pengangkutan dan komunikasi
- (h) Perbankan dan lembaga keuangan lainnya
- (i) Sewa rumah

- (j) Produksi pemerintah dan pertahanan
- (k) Jasa-jasa lainnya.

2) Pendekatan Pendapatan (Income approach)

Pendekatan pendapatan diperoleh dengan menghitung jumlah balas jasa bruto (belum dipotong pajak) dari faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu tanah, modal, tenaga kerja dan wiraswasta /entrepreneurship. Bentuk balas jasa dari faktor-faktor produksi tersebut adalah tanah dalam bentuk sewa, tenaga kerja adalah upah/gaji, modal/capital adalah bunga dan entrepreneurship adalah deviden.

3). Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan permintaan akhir dari unit-unit ekonomi yaitu rumah tangga berupa konsumsi, perusahaan berupa investasi dan pemerintah disebut pengeluaran pemerintah.

Perkembangan produk domestik bruto dapat dilihat dengan dua macam :

1). Produk Domestik Bruto atas dasar harga yang berlaku.

Produk Domestik Bruto atas dasar harga yang berlaku maksudnya bahwa besarnya nilai produk domestik bruto dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku pada tahun-tahun yang bersangkutan.

2). Produk domestik bruto atas dasar harga konstan.

Produk domestik bruto atas dasar harga konstan dapat dihitung nilai atas dasar harga-harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasarnya.

Produk domestik bruto digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan, dengan demikian dapat juga diketahui perkembangan produk domestik bruto dipengaruhi oleh :

1). Akumulasi Modal.

Akumulasi modal akan terjadi jika ada proporsi tertentu dari pendapatan sekarang yang ditabung yang kemudian di investasikan untuk memperbesar *output* pada masa akan datang. Investasi yang dilakukan dapat berwujud tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia.

2) Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan angkatan kerja. Kenaikan angkatan kerja yang terjadi dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif akan terjadi apabila kenaikan kerja yang terjadi dapat terserap dan meningkatkan *output*. Sedangkan dampak negatif adalah jika peningkatan angkatan kerja tidak mampu diserap oleh kegiatan ekonomi, sehingga terjadi surplus tenaga kerja (pengangguran).

3) Kemajuan Teknologi.

Kemajuan teknologi dapat memperluas tenaga kerja atau perluasan modal. Kemajuan teknologi yang bersifat perluasan tenaga kerja terjadi jika kualitas atau keahlian angkatan kerja ditingkatkan. Sementara itu kemajuan teknologi yang bersifat perluasan modal terjadi jika penggunaan modal secara lebih produktif. Kedua hal ini dapat meningkatkan *output*.

Menurut Mulia Nasution (1997,h.62-63) kegunaan perhitungan produk domestik bruto bagi suatu negara adalah:

- 1). Pendapatan nasional merupakan alat ukur tinggi rendahnya tingkat kemakmuran suatu negara yaitu pendapatan perkapita.
- 2). Mengetahui struktur perekonomian negara yang bersangkutan, apakah negara agraris atau industri.
- 3). Menentukan dan menyusun berbagai kebijakan lebih lanjut.
- 4). Konsumsi (pengeluaran masyarakat atau pemerintah), tabungan, investasi dan pendapatan nasional merupakan landasan untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk masa datang.
- 5). Membandingkan kegiatan ekonomi masyarakat, swasta dan pemerintah dari tahun ketahun.

Dengan demikian produk domestik bruto adalah barometer suatu negara untuk menentukan perekonomiannya dan pertumbuhan produk domestik bruto sebagai alat ukur dari keberhasilan pemerintah dalam perekonomian .

B. Kebijakan Fiskal

Fiscal policy (kebijaksanaan fiskal) yang berasal dari kepustakaan Anglo-Saxon (Inggris) merupakan kebijaksanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pada dasarnya, secara umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan/ kekayaan dan upaya kesempatan kerja.

Kebijaksanaan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijaksanaan atau pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Subjek kebijaksanaan fiskal adalah

penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan segala aspeknya termasuk aspek hukum, aspek politik, dan lain-lain.

Sebelum tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah dan dinilai bertujuan atas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya pajak hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional.

Akibatnya, dalam masa depresi, penerimaan pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah pun harus dikurangi pula. Hal ini justru berakibat pada semakin rendahnya pendapatan nasional serta semakin lesunya perekonomian. Kalau timbul deflasi atau inflasi, kebijakan yang dipercayai untuk menanggulangnya adalah kebijakan moneter lewat Bank Sentral dan bukan kebijaksanaan fiskal.

Pada masa depresi tahun 1930-an itulah teori kebijakan fiskal pertama kali muncul karena tidak mampunya kebijaksanaan moneter dalam menanggulangi depresi itu. Kebijaksanaan moneter biasanya berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta. Pada saat terjadi pengangguran dan harga-harga turun (depresi), maka cara yang ditempuh oleh kebijaksanaan moneter dapat dengan menambah uang yang beredar lewat politik diskonto dengan menurunkan tingkat bunga, atau menurunkan deking (*reserve requirement*) atau dengan politik pasar terbuka, di mana pemerintah membeli surat berharga.

Dasar pemikiran kebijaksanaan fiskal ialah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dan tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Umumnya para individu akan mengurangi pengeluaran

apabila penerimaannya menurun, sedangkan pemerintah tidak harus berbuat demikian, karena apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka tindakan ini justru akan lebih menyusahkan atau memperberat jalannya roda perekonomian negara.

Menurunnya pengeluaran pemerintah berarti menurunnya pendapatan masyarakat sebagai objek pajak dan selanjutnya justru memperkecil penerimaan pemerintah lagi. Di samping itu juga disadari bahwa dalam masa depresi, banyak dana masyarakat (swasta) yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi sektor swasta lewat kenaikan tingkat bunga.

Instrumen yang digunakan dalam kebijaksanaan fiskal adalah berupa perpajakan termasuk pajak umum, retribusi dan sumbangan, subsidi termasuk bantuan penggunaan kekayaan negara, kebijaksanaan pengeluaran atau percetakan uang negara, kebijaksanaan utang negara, dan kebijaksanaan transfer.

Perkembangan selanjutnya kebijaksanaan fiskal dapat dibedakan dalam empat macam atas dasar:

a. *Pembiayaan Fungsional (Functional Expenditure)*

Tokoh kebijaksanaan fiskal jenis ini adalah **A.P. Lerner**. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja (*employment*).

Di lain pihak, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga dalam masa ada pengangguran pajak sama sekali tidak diperlukan. Selanjutnya, pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam

masyarakat. Kemudian apabila pajak maupun pinjaman dirasa tidak tepat, maka ditempuhlah pencetakan uang. Jadi, pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal yang terpisah. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa tanpa ada hubungan langsung antara keduanya, akan ada bahayanya yaitu kemungkinan pengeluaran semakin berlebihan.

b. *Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach)*

Pendekatan ini lebih banyak disukai dari pada pendekatan "pembiayaan fungsional" karena pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam pendekatan ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Tokoh dalam pendekatan ini adalah *Alvin Hansen* yang menyarankan bahwa dalam masa depresi di mana ada banyak pengangguran, pengeluaran pemerintah yang meningkat adalah satu-satunya obat.

c. *Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget)*

Pada akhir tahun 1940-an kepercayaan lebih banyak diberikan pada mekanisme otomatis daripada kebijaksanaan fiskal. Penyesuaian otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa, sehingga menstabilkan perekonomian tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah yang disengaja.

Dengan Stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan atas dasar perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, dan pajak akan ditentukan sehingga me-nimbulkan surplus dalam periode kesempatan

kerja penuh. Apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah, namun penerimaan dari pajak akan menurun, terutama dari pajak pendapatan.

Sebaiknya dalam masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tidak perlu banyak tunjangan pengangguran, sehingga akan ada surplus anggaran belanja. Peranan *built in flexibility* ini dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek pekerjaan umum.

d. *Anggara Belanja Seimbang (Balanced Budget Approach)*

Suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (*managed budget*) adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada depresi dan surplus pada masa inflasi. Kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dapat pula diikuti pendekatan serupa tetapi harus tetap mempertahankan keseimbangan anggaran. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan dan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar utang negara.

Disamping itu tujuan dari kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah tersebut adalah:

a. Mencegah Pengangguran

Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari kebijaksanaan fiskal. Kegagalan mencapai kesempatan kerja penuh bukan berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang

optimum, tetapi juga berakibat kurang menyenangkan bagi perorangan yang menderita atau yang mengalami pengangguran.

b. **Stabilitas Harga**

Aspek kedua dari tujuan kebijaksanaan fiskal adalah mempertahankan Stabilitas harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dari harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran, karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan, bahkan keuntungan mereka justru semakin mengecil. Selanjutnya, investasi swasta hampir tidak ada lagi lebih-lebih bila mereka memperkirakan harga-harga akan turun terus-menerus. Sebaliknya, bila harga-harga umum meningkat terus juga akan berakibat tidak menggembirakan. Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok orang, tetapi juga akan mempersulit kehidupan orang-orang yang berpenghasilan rendah terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Inflasi yang deras akan cenderung melemahkan sektor usaha swasta, karena investasi produktif umumnya berubah menjadi investasi barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Dalam jangka panjang inflasi akan berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya.

C. Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Disamping itu

menurut Warjino dan sodikin (2003), kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (antara lain dapat berupa uang beredar, uang primer, tingkat bunga, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.

Kebijakan moneter diserahkan sepenuhnya pada Bank Indonesia yang merupakan badan independen. Indonesia telah membuat perubahan fundamental dalam kebijakan moneternya seiring dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. *Pertama*, kebijakan moneter difokuskan untuk memelihara dan menjaga stabilitas rupiah. *Kedua*, pemberian independensi yang lebih besar kepada Bank Indonesia dalam menentukan target inflasi dan arah kebijakan moneternya. *Ketiga*, keputusan pemilihan kebijakan diserahkan pada Gubernur Bank Indonesia tanpa intervensi dari pemerintah dan lembaga lain. *Empat*, adanya akuntabilitas dan transparansi kebijakan moneter yang mewajibkan Bank Indonesia mengumumkan target inflasi dan rencana kebijakan moneter pada setiap permulaan tahun.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio).

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio

cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion).

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian

D. Teori Perdagangan internasional

Perkembangan teori perdagangan internasional dimulai sejak abad ke 17 sampai ke abad 20 an. Teori ini memberikan jawaban terhadap apa yang menjadi dasar dan keuntungan perdagangan dan bagaimana pola perdagangan tersebut.

Teori perdagangan internasional tersebut adalah :

1. Teori Merkantilisme

Kaum merkantilisme percaya bahwa sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungandari perdagangan dengan mengorbankan negara lainnya. Sebagai akibatnyamereka menganjurkan agar dilakukan pembatasan yang ketat terhadap impor, membelikan intensif terhadap ekspor serta memberlakukan peraturan pemerintah yang ketat terhadap semua aktifitas ekonomi.

2. Teori Klasik

a. Adam Smith

Perdagangan didasarkan pada keunggulan absolute dan akan menguntungkan kedua belah pihak. Artinya jalur setiap negara melakukan spesialisasi pada produksi komoditi yang memiliki keunggulan absolute dan menukarkan sebagian output ini untuk memperoleh output yang memiliki absolute, maka kedua negara akan dapat mengkonsumsi lebih banyak kedua komoditi.

b. Davis Ricardo

Perdagangan didasarkan atas keunggulan komparative. Teori ini mengatakan bahwa meskipun salah satu negara kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, masih terdapat dasar dilakukannya perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak (sepanjang proporsi kerugian absolute satu negara pada kedua komoditi tidak sama) negara yang kurang efisien harus berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang kerugian absolute lebih sedikit.

3. Teori Modern

a. Teori Heekseher Ohim

Perdagangan internasional berlangsung atas dasar keunggulan komparative yang berbeda dari masing-masing negara. Teori ini juga menyinggung mengenai dampak perdagangan internasional terhadap harga atau tingkat pendapatan dari masing-masing faktor produksi.

b. The equalization of factor prices (kesamaan harga faktor produksi)

Teori ini dikemukakan oleh P. Samrelson dan menyatakan bahwa perdagangan bebas cenderung melibatkan harga faktor produksi sama di berbagai negara, teori ini didasarkan pada teori faktor proportions, dimana selama suatu negara

memperbanyak produksi terhadap suatu barang (banyak mempergunakan TK), maka permintaan terhadap tenaga kerja bertambah. Sebaliknya produksi barang yang banyak mempergunakan kapital akan berkurang dan hal ini cenderung menurunkan upah dan menaikkan harga kapital.

c. James Meade

Mengemukakan tentang general quilibrium (Offer curve) yaitu menjelaskan bagaimana terjadinya keseimbangan harga internasional. Hal ini dapat digambarkan dengan metode, dimana tiap negara berupaya mengembangkan produksi atas dasar tersedia faktor endowment dan melakukan perdagangan internasional maka keuntungan akan diperoleh melalui spesialisasi dalam produksi serta ekspor barang-barang mereka.

Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (current account) dari neraca pembayaran internasional, khususnya terhadap ekspor dan impor barang dan jasa.

Jenis kebijakan perdagangan internasional ini adalah :

1. Tarif terhadap impor dan ekspor dan non tarif
2. Bilateral trade agreement
3. Strate trading
4. Quota
5. Subsidi

Kebijakan perdagangan internasional ini diatas dapat menghambat perdagangan yang terjadi dari 2 negara atau lebih.

III. Pembahasan .

A. Gambaran Ekonomi Indonesia :

Tahun 1998 menjadi saksi bagi tragedi terkalam perekonomian bangsa, dimana krisis perekonomian sudah berjalan enam bulan selama tahun 1997, berkembang memburuk dalam waktu cepat. Dampak krisis pun mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Keadaan ini sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Prestasi ekonomi yang dicapai dalam dua dekade, tenggelam begitu saja. Krisis ini juga sekaligus luluh lantakan semua bayangan indah di dalam menyongsong milenium ketiga.

Sepertinya efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar Baht di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi, berlanjut lagi krisis sosial kemudian ke krisis politik. Akhirnya, dia juga berkembang menjadi krisis total yang melumpuhkan nyaris seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Katakan, sektor apa di negara ini yang tidak goyah.

Kondisi Indonesia, diakhir tahun 1997 dan di tahun 1998 adalah:

- a. Rupiah terjun bebas hampir mencapai Rp 17.000 per dolar AS.
Rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dolar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/1999 yang diumumkan 6 Januari 1998 dan dinilai tak realistis.
- b. Pasar uang dan pasar modal juga rontok, dimana 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga insolvent atau bangkrut. Di pasar modal, IHSG anjlok ke titik terendah, 292,12 poin pada tahun 1998 dari 467,339 pada semester satu

tahun 1997. Sementara kapitalisasi pasar menciut drastis dari Rp 226 triliun menjadi Rp 196 trilyun pada awal Juli 1998.

- c. Bank-bank nasional dalam kesulitan besar dan peringkat internasional bank besar bahkan juga surat utang pemerintah terus merosot ke level di bawah junk .
- d. Pendapatan per kapita yang mencapai USD 1.155 per kapita tahun 1996 dan USD 1.088 per kapita tahun 1997, menciut menjadi USD 610 per kapita tahun 1998.
- e. Pertumbuhan ekonomi 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 dan nol persen kuartal terakhir 1997, terus menciut tajam menjadi minus 7,9 persen pada kuartal I 1998, minus 16,5 persen kuartal II 1998, dan minus 17,9 persen kuartal III 1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Indikator ekonomi	1998	2008
Pertumbuhan ekonomi	-13,10%	4,12%
Inflasi	82,4%	12,14%
Cadangan devisa	US\$17,4 miliar	US\$80,20 miliar
Kurs rupiah	Rp16.650/US\$	Rp12.650/US\$
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	100%	27,4%
Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross	30%	3,8%
BI Rate	60%	9,5%
Indeks harga saham gabungan (IHSG)	256	1.111
Total utang luar negeri (Pemerintah dan swasta)	US\$150,8 miliar	US\$155,08 miliar
Rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa	8,6 kali	3,1 kali

Sumber : Bank Indonesia di olah.

Dalam rentang waktu diatas, tahun 1990 s/d 2009 telah terjadi krisis ekonomi di Indonesia yaitu 1998 dan 2008. Krisis yang terjadi ditahun 1998 dan 2008 sangat berbeda yaitu laju GDP Indonesia bernilai negatif -13,13% dan merupakan kondisi yang paling

buruk bila dibandingkan dengan Filipina dan Thailand. Menurut Djowandono (2000), krisis yang dialami oleh Indonesia 1998 merupakan perpaduan antara faktor eksternal dan internal yang mengganggu fondasi ekonomi (tekanan yang berasal dari luar perekonomian, lemahnya fondasi perekonomian, dan adanya *shock* di pasar keuangan Indonesia yang berlebih) sehingga memicu terjadinya krisis Indonesia 1998. Selanjutnya, ditahun 2008 – 2009, dunia kembali mengalami masa krisis di mana dampak yang dihasilkan adalah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dunia. Pusat dari krisis *global* berasal dari Amerika Serikat yaitu kredit macet di dalam sistem investasi perumahan, di mana pada masa sebelum krisis lembaga pemberi dana kredit tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*risk analysis*). Untuk Indonesia pada saat itu, dampak krisis *global* terhadap nilai tukar rupiah, Indeks saham gabungan, dan moneter.

B. Peningkatan Ekonomi Tanpa Utang Luar Negeri

1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sebagai akibat dari krisis ekonomi, maka APBN mengalami tekanan yang sangat berat. Kemampuan APBN sebagai stimulus fiskal menjadi terbatas. Ekspansi fiskal sebagian besar akan dipergunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang, disamping penyediaan subsidi bagi beberapa kebutuhan pokok masyarakat termasuk subsidi bahan bakar minyak.

Agar dapat keluar dari krisis, dan tekanan yang dihasilkan oleh krisis tersebut, maka diperlukan kebijakan operasional APBN yang efektif dan efisien agar bersama-sama dengan kebijakan ekonomi makro lainnya. Adapun kebijakan operasional APBN yang harus dilakukan diantaranya adalah :

- 1) Merubah format APBN, dari yang semula berbentuk T- Account menjadi format standar seperti Government financial statistics(GPS). Format ini mencerminkan bahwa pada sisi penerimaan terbagi atas penerimaan DN (pajak dan non pajak) dan hibah. Sementara sisi pengeluaran negara terbagi atas anggaran belanja pemerintah pusat (rutin dan pembangunan) dan dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan alokasi khusus). Dengan format baru ini dengan cepat terlihat keseimbangan umum yang menunjukkan kondisi surplus atau pun defisit dari APBN. Dan juga dapat diketahui sumber pembiayaan yang diperlukan jika kondisi defisit.
- 2) Mengefektifkan penerimaan dalam negeri yaitu mendorong penerimaan pajak (melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, perbaikan struktur pajak, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dan administrasi pemungutan pajak, pencabutan berbagai fasilitas pajak), Mendorong penerimaan dalam negeri bukan pajak(Sumber daya alam dan laba BUMN), melakukan privatisasi BUMN dan Aset restrukturisasi perbankan.
- 3) Efisiensi belanja rutin.
- 4) Penajaman prioritas alokasi pengeluaran pembangunan.
- 5) Efektivitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
- 6) Budgetisasi dana-dana off budget yaitu dana-dana yang selama ini tidak masuk APBN dimasukan (Pendapatan-pendapatan yayasan milik pemerintah yang dikuasai oleh departemen-departemen).
- 7) Menyusun APBN dengan asumsi yang realitis dan akurat yaitu menyusun APBN berdasarkan indikator ekonomi yang ada (inflasi, pertumbuhan ekonomi, krus dll).

Dalam tahun 2008, pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8 persen. Sasaran pertumbuhan tersebut diharapkan bersumber dari peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor. Konsumsi diperkirakan meningkat sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat. Sementara itu, meningkatnya kinerja investasi terkait Bab II NK dan APBN 2008 II-3 dengan kemajuan penyelesaian berbagai peraturan perundangan perbaikan iklim investasi serta pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur. Selanjutnya, meningkatnya nilai ekspor, terutama ekspor nonmigas, ditopang oleh perkiraan membaiknya kinerja industri pengolahan.

2. Kebijakan Moneter dan Perbankan.

Titik lemah perekonomian Indonesia terletak paling tidak pada keterlambatan dalam pembenahan tiga mata rantai permasalahan yaitu kondisi moneter yang tidak stabil, kondisi perbankan yang lemah dan kondisi dunia usaha yang dibebani masalah utang, yang diperburuk oleh kondisi sosial politik yang sepenuhnya belum stabil, mengakibatkan rendahnya kepercayaan para pelaku ekonomi. Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan adalah (1) Penyehatan perbankan (melalui program penjaminan pemerintah untuk bank-bank yang dialihkan ke BPPN), (2) Pemantapan ketahanan sistem perbankan yaitu melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan mutu pengelolaan perbankan, penyempurnaan ketentuan perbankan dan pemantapan fungsi pengawasan perbankan.

3. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.

Kinerja perdagangan luar negeri dapat dilihat dari neraca berjalan yang belum mengambirakan. Di satu sisi defisit neraca modal menyebabkan pasokan mata uang asing (devisa) bagi keperluan pembangunan ekonomi menjadi berkurang. Pasokan devisa

yang berkurang dihadapkan dengan kebutuhan devisa yang meningkat untuk keperluan impor dan pembayaran utang menuntut adanya kebijakan operasional yang mampu meningkatkan ekspor barang dan mengundang masuknya investasi luar negeri. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menurunkan impor dan mencegah terjadinya capital outflow.

Kebijakan Ekspor yang dibutuhkan adalah yang mendorong untuk menghasilkan komoditi ekspor yang berorientasi global dan bertehnologi tinggi yang mampu memberikan nilai persaingan diluar negeri. Disamping itu juga diperlukan kebijakan industri, perdagangan dan investasi untuk meningkatkan daya cipta keunggulan bersaing global dan membuka aksesibilitas terhadap kesempatan kerja, agar tercipta keunggulan bersaing sesuai dengan endowment yang dimiliki Indonesia yaitu SDM dan SDA.

Selain kebijakan ekspor juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Pengembangan Ekspor Terpadu (KAPET)

Kebijakan dibidang impor adalah menghambat impor melalui tarif dan non tarif atas komoditi tertentu. Namun dengan kesepakatan perdagangan dunia, maka hambatan perdagangan tersebut dihapus. Jadi jalan yang harus dilakukan adalah melalui penyediaan barang-barang pengganti impor (perusahaan yang menghasilkan didorong untuk lebih banyak memproduksi).

4. Kebijakan Non Ekonomi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan keluar dari krisis yang dihadapi dengan kebijakan-kebijakan diatas diperlukan kebijakan non ekonomi. Kebijakan non ekonomi ini sangat mendukung agar masalah krisis yang dihadapi cepat teratasi. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah (1) Menjalankan paradigma good governance yang

menekankan arti pentingnya kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar dan masyarakat (pemerintahan yang bersih), (2) Penegakan supermasi hukum agar tidak terciptanya iklim usaha yang egaliter dan persaingan usaha yang tidak sehat serta dominannya praktik monopoli atau kartel pada komoditi-komoditi strategis berkat fasilitas KKN, (3) Peningkatan keamanan agar terhindar dari tindakan kriminal, konflik sara dll, (4) Penegakan HAM secara global, (5) Transparansi, (6) Demokratisasi / reformasi.

IV. Kesimpulan

Krisis yang terjadi di Indonesia yang diawali oleh nilai tukar yang tidak bisa dikendalikan akibat banyaknya permintaan valuta asing untuk kebutuhan pembayaran utang pihak pemerintah dan swasta, kemudian ditambah dengan tindakan-tindakan spekulasi yang terjadi telah merusak seluruh sendi-sendi kehidupan negara. Akibat nyata yang terlihat dari dampak tersebut adalah meningkatnya pengangguran dan semakin miskinnya masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya tindakan kriminalitas.

Usaha untuk pemulihan adalah dengan (1) kebijakan APBN yaitu defisit pada APBN diperkecil dengan mencarikan sumber-sumber dalam negeri,(2) Kebijakan moneter dan Perbankan yaitu melalui program penyehatan perbankan dan pemantapan ketahanan perbankan, (3) Kebijakan dalam perdagangan luar negeri dengan ekspor dan impor yaitu mendorong ekspor dengan berbagai fasilitas dan mengurangi impor dengan pengadaan barang impor (substitusi impor), (4) Kebijakan non ekonomi yaitu menegakan supermasi hukum, Ham dan lainnya.

Pengembangan/ peningkatan ekonomi yang terjadi akibat pelaksanaan kebijakan – kebijakan diatas adalah (1) pemerintah telah menyusun RAPBN sesuai dengan

kemampuan salah satunya mematok nilai kurs dan pertumbuhan ekonomi untuk menentukan sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran dan melakukan prinsip prioritas, (2) Dengan kebijakan moneter dan perbankan terlihat dari kenaikan CAR pada bank, mulai mengucurnya penyaluran kredit terutama UKM, menurunnya ratio kredit bermasalah, meningkatnya perhimpunan dana perbankan dan net interest margin yang positif, (3) Kebijakan perdagangan luar negeri diperlihatkan oleh membaiknya neraca perdagangan pada tahun 1999/2000 s/d 2003/2004. (4) Pada kebijakan non ekonomi masih belum terlihat, walaupun telah banyak diangkat persoalan korupsi kepengadilan, tetapi belum membawa hasil seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyanto, AT, *Keluar Dari Krisis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Prawiro, R, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1998.
- Tambunan T, *Krisis Ekonomi Indonesia*, LP3E Kadin Indonesia Jakarta, 1998.
- Departemen Keuangan, *Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 1999/2000*.
- Rahman Prawiraamidjaja, *Keuangan Negara Dan Kebijakan Fiskal*, Alumni Bandung 1974
- Mankiw, N. G. 2000. *Pengantar Ekonomi*. Jilid 2. Munandar dan Salim [penerjemah]. Sumiharti dan Kristi aji [editor]. Erlangga, Jakarta.
- Maryatmo, R. 2004. *Dampak Moneter Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah dan Peranan Asa Nalar dalam Simulasi Model Makro-Ekonomi Indonesia (1983:1-2002:4)*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2004.
- Suparmoko, *Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara*, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada 1982.
- Nasution Mulia; 1997, *Teori Ekonomi Makro (Pendekatan Pada Perekonomian)*. Jakarta: Penerbit Jembatan